



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja lingkup pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pelaksanaan kegiatan satuan kerja lingkup pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada kolom 3 selaku penanggung jawab Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 sampai dengan ditetapkannya Kegiatan yang baru.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan sebagian Kegiatan pada kolom 4 dapat ditunjuk lebih dari satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditugaskan menyelesaikan bagian pekerjaan, sesuai prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 tercantum dalam DIPA dengan nama Satuan Kerja sebagaimana tercantum pada kolom 5.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Haryani Nugrohowati

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 127/KEPMEN-KP/2015  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
 ANGGARAN 2015

**PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PUSAT YANG DIJABAT OLEH ESELON II DEFINITIF**

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
1.		Kepala Biro Kepegawaian	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP	Biro Kepegawaian
2.		Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan Perikanan	Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga
3.		Kepala Biro Perencanaan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Pembangunan KKP	Biro Perencanaan
4.		Kepala Biro Keuangan	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	Biro Keuangan

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.		Kepala Biro Umum	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	Biro Umum
6.		Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Dewan Kelautan Indonesia
<b>II</b>	<b>Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</b>			
1.		Direktur Perencanaan Ruang Laut	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.		Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis  Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Direktorat Konservasi Kawasan Dan Jenis Ikan  Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang - CTI
3.		Direktur Pendayagunaan Pesisir	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Direktorat Pesisir dan Lautan
4.		Direktur Jasa Kelautan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha  Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD)

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>III</b>	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</b>			
1.		Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.		Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3.		Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)  Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Direktorat Sumber Daya Ikan  COREMAP-CTI Project Ditjen Perikanan Tangkap
4.		Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
5.		Direktur Kenelayanan	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
<b>IV</b>	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
1.		Direktur Perbenihan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya
2.		Direktur Produksi dan Usaha Budidaya	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Direktorat Produksi Perikanan Budidaya

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.		Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
4.		Direktur Pakan	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Direktorat Usaha Perikanan Budidaya
<b>V</b>	<b>Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b>			
1.		Direktur Pengembangan Investasi	Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan	Direktorat Usaha dan Investasi
2.		Direktur Akses Pasar dan Promosi	Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran Luar Negeri
3.		Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan	Direktorat Pengembangan Produk Non Konsumsi
<b>VI</b>	<b>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)</b>			
1.		Direktur Penanganan Pelanggaran	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Direktorat Penanganan Pelanggaran



<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>VII</b>	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
1.		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	Inspektorat Jenderal
2.		Inspektur I	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
3.		Inspektur II	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
4.		Inspektur III	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
5.		Inspektur IV	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
6.		Inspektur V	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu Pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V	Inspektorat Jenderal
<b>VIII</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</b>			

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan	<p>Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya</p> <p>Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan</p>	<p>Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya</p> <p>Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan</p>
2.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut Dan Pesisir	<p>Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir</p> <p>Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir</p> <p>Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan</p>
3.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
4.		Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b>Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>			
1.		Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	Sekretariat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
2.		Kepala Pusat Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
3.		Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
4.		Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
<b>X</b>	<b>Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)</b>			
1.		Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)
2.		Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3.		Kepala Pusat Standarisasi Kepatuhan, dan Kerja Sama	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pusat Manajemen Mutu
4.		Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	Pusat Karantina Ikan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*[Handwritten Signature]*  
Haryani Nugrohowati

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 127/KEPMEN-KP/2015  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
 ANGGARAN 2015

**PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PUSAT YANG DIJABAT OLEH PELAKSANA TUGAS (PLT)**

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
1.		Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP  Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Biro Hukum dan Organisasi
2.		Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan Perikanan	Pusat Data, Statistik, dan Informasi
<b>II</b>	<b>Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</b>			

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
1.		Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
2.		Plt. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
<b>III</b>	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</b>			
1.		Plt. Direktur Pelabuhan Perikanan	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Direktorat Pelabuhan Perikanan
<b>IV</b>	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
1.		Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
2.		Plt. Direktorat Kawasan Budidaya	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
<b>V</b>	<b>Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b>			

<b>No</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>	<b>KEGIATAN DALAM DIPA</b>	<b>SATUAN KERJA DALAM DIPA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.		Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
2.		Plt. Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan	Direktorat Pengembangan Produk Non Konsumsi
3.		Plt. Direktur Sistem Logistik	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran Dalam Negeri
<b>VI</b>	<b>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)</b>			
1.		Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)
2.		Plt. Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
3.		Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
4.		Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
5.		Plt. Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Direktorat Kapal Pengawas
<b>VII</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)</b>			
		Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KP3K	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Maryani Nugrohowati